

TESIS

PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

EFFECT OF INVESTMENT, LABOR AND GOVERNMENT SPENDING ON POVERTY IN THE PROVINCE SOUTH SULAWESI

**Muh. Asfar
A 0521 82 001**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

EFFECT OF INVESTMENT, LABOR AND GOVERNMENT SPENDING ON POVERTY IN THE PROVINCE SOUTH SULAWESI

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar megister

Disusun dan diajukan oleh

MUH. ASFAR

A 0521 82 001



Kepada

**PROGRAM MEGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

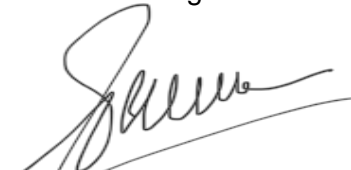
Disusun dan diajukan oleh

Muh. Asfar
A052182001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Sumber Daya** Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 28 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nursini, SE., MA
NIP. 19660717 199103 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, S.E., M.Si
NIP. 19650225 199303 1 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Sumber Daya



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si CWM®
NIP. 19770913 200212 2 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si, CIPM, CWM, CRA.
NIP. 19640205 198810 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Asfar
NIM : A052182001
Program Studi : Ekonomi Sumber Daya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

“Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Desember

2021 Yang membuat

pernyataan.



Muh. Asfar

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanawataala rabb semesta alam, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Semata karena atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan secara moril dan materiil dari berbagai pihak selama masa perkuliahan hingga pada penyusunan tugas akhir, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca Tesis ini. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.

Oleh karenaitu, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat, penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orangtua, Ayahanda Muhammad Jafar. S.Pd. dan Ibunda Rasniah Sahibu S.Pd.I, dalam mendidik, membesarkan, dan mendoakan penulis sampai berada pada posisi saat ini. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orangtua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah memberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-cita. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Saudara penulis, Rizky Agusnia Jafar S.Pd, M.P.d yang selalu membantu dan memberikan semangat semasa penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Nursini, SE., MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir.

Muhammad Jibril Tajibu, S.E., M.Si. sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini. Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2. penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas dan ketua Prodi ESD Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM® Terimah kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota tim penguji Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA., Bapak Dr. Anas Iswanto, SE., MA. dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., sebagai tim penguji yang sudah memberikan saran dan arahan dalam melengkapi tesis ini. yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini.

Dan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Sumber daya Unhas dan Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik. Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada Semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua mendapat balasan dari Allah Subhanawataala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, namun demikian penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 27 Desember
2022



Muh. Asfar

ABSTRAK

MUH. ASFAR. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Nursini dan Muhammad Jibril Tajibu).

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh Investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Kemenkeu. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan struktural. Objek penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data *time series* tahun 2000-2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kemudian, investasi menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja terhadap kemiskinan berpengaruh signifikan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pun pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan berpengaruh positif. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, melalui, pertumbuhan ekonomi



ABSTRACT

MUH. ASFAR. *The Effect of Investment, Manpower, and Government Spending on Poverty Through Economic Growth in South Sulawesi Province* (supervised by Nursini and Muhammad Jibril Tajibu)

This study aims to analyze how much influence investment, labor and government spending have on poverty through economic growth in South Sulawesi Province. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), DJPK Ministry of Finance, the analysis method used is structural equations. The object of this research is the Province of South Sulawesi. This study uses time series data from 2000-2021. The research findings show that investment has a positive effect on economic growth in South Sulawesi. Then investment shows a positive effect on poverty. Labor has a positive effect on economic growth. while labor has a significant effect on poverty. Government spending has a positive effect on economic growth. Even so, government expenditure has a positive effect on poverty. And economic growth has a positive effect on poverty in the province of South Sulawesi.

Keywords: investment, labor force, government spending, poverty, through economic growth.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 13 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	13
2.1.2 Kemiskinan.....	13
2.1.3 Investasi	20
2.1.4 Tenaga Kerja.....	28
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah	32
2.2 Tinjauan Empiris	42
2.2.1 Peta Study Sebelumnya	45
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	49
3.1. Kerangka Konseptual	49
3.2. Hipotesis.....	50
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	51
4.1. Ruang Lingkup Penelitian	51

4.2. Jenis dan Sumber Data.....	51
4.3. Jenis Variabel Penelitian.....	52
4.4. Definisi Operasional Variabel.....	53
4.5. Model Analisis Data	54
Bab 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
5.1 Deskripsi Data	56
5.1.1 perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan.....	56
5.1.3 Perkembangan investasi Di Provinsi Sulawesi Selatan	58
5.1.4 Perkembangan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Selatan	62
5.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Provinsi Sul-Sel.....	64
5.2 Hasil Penelitian	67
5.3 pembahasan.....	68
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	71
Daftar Pustaka	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Marginal Efficiency Of invesment (MEI)	24
Gambar 2.2 Marginal Efeciciency of Capital (MEC)	27
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Persentase Penduduk miskin Sulawesi Selatan	4
5.1. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan.....	57
5.3. Perkembangan Investasi Sulawesi Selatan	60
5.4. Perkembangan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.....	63
5.5. Pengeluaran Pemerintah di Povinsi Sulawesi Selatan	66
5.6. Hasil Analisis Hubungan Antar Variabel.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan suatu negara. Sementara itu, tujuan pembangunan yang terpenting adalah pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan. teori *trickle-down effect* oleh (Arthur Lewis 1954) dan diperluas (Ranis dan Fei 1968). bahwa kemajuan yang diperoleh sekelompok orang secara otomatis akan menetes ke bawah untuk menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi bagi terciptanya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kemiskinan juga menjadi salah satu faktor utama penghambat dari proses pembangunan dimana pengentasan kemiskinan sendiri menjadi salah satu prioritas utama bagi pembangunan pemerintah Indonesia. Pembangunan di Sulawesi Selatan sendiri masih kurang merata dan tidak menjangkau seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

Pemerintah daerah Sulawesi Selatan tentunya tidak menginginkan penduduknya banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan atau terkategori penduduk miskin di daerahnya yang relatif banyak. Untuk itu belanja pembangunan daerah seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

agar kemiskinan dapat berkurang. Pemerintah daerah mengeluarkan belanja pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bila kesejahteraan masyarakat meningkat, salah satu indikatornya adalah berkurangnya penduduk miskin di daerah tersebut.

Tingkat kesejahteraan masyarakat mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Tingkat kesejahteraan dapat mencakup pangan, pendidikan, kesehatan dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbatasan dari kemiskinan dan sebagainya. Menurut PBB saat ini Indeks Perkembangan Manusia (IPM) sebagai penilaian yang bersifat komposit atas perkembangan konsumsi, kesehatan dan pendidikan masyarakat digunakan secara luas untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Sulawesi Selatan cukup rumit karena wilayah yang cukup luas, kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Yoserizal, 2015)

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di Indonesia. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih di bawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan semakin luas disebabkan karena tingginya disparitas antar

daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan timur Indonesia, dengan sebagian besar penduduknya hidup pada sektor pertanian, belum dapat melepaskan diri dengan persoalan kemiskinan mengingat masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan multi dimensi, maka untuk mengatasi masalah kemiskinan juga harus bersifat multidimensional atau menggunakan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral. Sedangkan distribusi penduduk miskin tahun 2020 di wilayah Sulawesi ternyata tertinggi berada di provinsi Sulawesi Selatan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan diharapkan lebih peka terhadap isu kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan suatu kebijakan strategis yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan tersedianya data dan Informasi kemiskinan yang akurat dan up to date sehingga program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 Penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup banyak. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan, Seperti pada periode 2020, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh

adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2000 sampai dengan September 2021 disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2000-2021

No	Tahun	Jumlah jiwa Ribu	Persen (%)
1	2000	1 096,60	15.90
2	2001	1 082,70	14.30
3	2002	1 070,50	14.30
4	2003	1 058,79	14.50
5	2004	1000.60	14.90
6	2005	1035,00	14.98
7	2006	1111,90	14.57
8	2007	1 083,40	14.11
9	2008	1 031,70	13.41
10	2009	963,90	11.93
11	2010	917,40	11.40
12	2011	835,50	10.27
13	2012	812,30	9.82
14	2013	863,20	10.32
15	2014	806,30	9.54
16	2015	797,72	9.39
17	2016	807,03	9.40
18	2017	813,07	9.38
19	2018	792,63	9.06
20	2019	767,80	8.69
21	2020	776,83	8.72
22	2021	784,98	8.78

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan mengalami perubahan dari tahun 2016 hingga 2021. Persentase penduduk miskin di Sulawesi selatan pada tahun 2016 sebesar 9,40 persen. Pada tahun 2017 adalah sebesar 9,38 penduduk miskin mengalami penurunan secara persentase yaitu sebesar 0,02 poin persen dibanding 2016 , tahun 2018, Persentase penduduk miskin Maret 2019

sebesar 8,69 persen juga mengalami penurunan 0,37 poin persen dibandingkan Maret 2018 yang besarnya 9,06 persen. jumlah penduduk miskin di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 8,72 persen terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya bgitupun tahun 2021 8,78 persen, Apabila dilihat berdasarkan gambar 1.1 penduduk miskin mengalami peningkatan secara persentase yaitu sebesar 0,03 poin persen, juga mengalami peningkatan secara absolut sebesar 9,03 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2019 yang besarnya 8,69 persen atau 767,80 ribu jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin 784 ribu jiwa. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19.

Jika dibandingkan secara spasial dalam skala regional Sulawesi, tingkat kemiskinan Sulsel berada pada urutan ke-2 terendah setelah Sulawesi Utara yang mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 7,78 persen, sementara provinsi lainnya yang ada di pulau Sulawesi men catatkan tingkat kemiskinan di atas 11 persen. Sedangkan dalam skala nasional, Sulsel menempati urutan ke-17 terendah dari 34 provinsi. Secara absolut jumlah penduduk miskin Sulsel pada September 2020 meningkat 40,66 ribu jiwa year over year (yoy) menjadi 800,24 ribu jiwa. Peningkatan signifikan terjadi di daerah perkotaan, yakni bertambah 32,69 ribu jiwa sedangkan sisanya 7,97 ribu di daerah perdesaan. Tekanan tingkat kemiskinan yang lebih rendah di daerah perdesaan berhubungan dengan bantuan BLT Dana Desa yang masif dan pencairannya relatif lebih cepat dibandingkan skema bantuan serupa di daerah perkotaan. Selain itu, pemberlakuan PSBB yang akhirnya berdampak pada lesunya aktivitas perekonomian lebih gencar diterapkan di daerah perkotaan. Namun secara keseluruhan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) dengan berbagai skema bantuan yang tersebar pada enam klaster telah berkontribusi menahan laju peningkatan tingkat kemiskinan Sulawesi selatan.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan perlu juga diketahui sebenarnya bahwa faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Sulawesi Selatan. Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita.

Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut sangat berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya berbagai ketimpangan dan adanya kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya. Jika kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus, maka pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi Provinsi Sulawesi selatan sehingga dapat menyulitkan terwujudnya Provinsi Sulawesi Selatan yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga kerja, Pengeluaran Pemerintah, Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh langsung investasi terhadap Kemiskinan?
2. Bagaimana Pengaruh langsung tenaga kerja terhadap kemiskinan ?
3. Bagaimana pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengaruh langsung Investasi terhadap Kemiskinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengaruh Langsung Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh langsung Kemiskinan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran yang bermanfaat untuk dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh investasi dan Tenaga kerja, pengeluaran pemerintah secara langsung terhadap kemiskinan sebagai referensi untuk pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia terkhusus disulawesi selatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
3. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para pengambil keputusan dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Propinsi sulawesi selatan dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
4. Bagi penulis, sebagai penerapan ilmu di bidang Teori Ekonomi yang telah diperoleh pada masa pendidikan di Sekolah Pascasarjana Program Ekonomi sumber daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten kota. Adapun yang menjadi fokus penelitian pada variabel yang mempengaruhi kemiskinan yang diduga dipengaruhi oleh investasi, Tenaga kerja, pengeluaran pemerintah di provinsi sulawesi selatan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

❖ Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi dasar pokok permasalahan (rumusan masalah) yang akan dibahas yaitu masalah

pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah, terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya membahas tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

❖ Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini termuat secara sistematis menyangkut beberapa teori, pemikiran serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

❖ Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Pada bab ini digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini disertai dengan beberapa hipotesis terkait penelitian yang dilakukan.

❖ Bab IV Metode Penelitian

Bab ini merupakan bahasan terakhir dalam proposal penelitian ini terkait beberapa sub bagian seperti Rancangan Penelitian, Situs dan waktu penelitian, Teknik Pengambilan data, Jenis dan Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, serta Teknik Analisis Data yang akan digunakan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan secara umum didefinisikan merupakan ketidak mampuan seseorang atau kelompok memenuhi kebutuhan standar hidupnya yang paling rendah. Dari definisi umum ini bahwa kemiskinan memiliki banyak permasalahan yang multidimensi, sehingga untuk mengukur kemiskinan memang bukan suatu hal yang mudah perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang digunakan.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). (kajian fiskal, 2020). Adanya penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan suatu pembangunan dan kesejahteraan suatu masyarakat besar kecilnya suatu penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan mereka yang tak memiliki apa apa, dan orang yang hidupnya senantiasa ditengah bahaya berupa kekurangan sumber daya pokok untuk bertahan hidup. (Seabrook, 2006). Kemiskinan memang adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk di perhatikan karena ketika suatu masyarakat berada pada posisi ketidak mampuan memenuhi kebutuhannya maka kelangsungan hidup akan sangat terbatas atau kata lain masyarakat tidak bisa hidup ketika tidak memiliki pemenuhan kebutuhan sehari harinya.

Watts mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat berarti baik kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan komoditas secara umum (yakni keterbatasan

terhadap sekelompok pilihan komoditas) Atau jenis konsumsi tertentu (misalnya terlalu sedikit mengonsumsi makanan) yang dirasa sangat esensial/perlu untuk memenuhi standar hidup dalam masyarakat maupun dalam arti kurangnya kemampuan untuk andil/berfungsi dalam masyarakat (Yoserizal, 2015).

Seseorang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh keberlangsungan hidup memang adalah sesuatu hal yang sangat penting karena ukuran kemampuan seseorang adalah terpenuhinya konsumsi sehari-hari dan kemudian untuk memenuhi komoditas yang lain rumah tangga atau individu memiliki sumber daya atau kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ini berdasarkan antara perbandingan pendapatan dan pengeluaran atau ukuran yang lain dari individu dengan beberapa batasan tertentu dimana seseorang dibawa batasan tersebut maka dia berada dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan pusat statistik, 2021)

Kemiskinan merupakan *“poverty is pronounced deprivation in well-being”* Dimana kesejahteraan dapat diukur oleh kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan, dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan dalam berbicara, juga kemiskinan merupakan kurangnya kesempatan atau peluang, ketidak berdayaan dan kerentanan. Dari definisi diatas kemiskinan benar-benar merupakan masalah yang multidimensi yang memerlukan kebijakan dan program yang intervensi multi dimensi pula sehingga kesejahteraan suatu individu masyarakat bisa meningkat dan terbebas dari kemiskinan. (Bank Dunia, 2000)

Kemiskinan diartikan sebagai perbandingan antara kemampuan seseorang

individu atau kelompok yang punya dan yang tidak punya (*the haves dan the have nots*). (Tjondronegoro, 2008). Maka dari itu pemerataan diperlukan dalam kesejahteraan suatu masyarakat agar tidak ada masyarakat yang memiliki banyak aset kepemilikan dan ada yang tak memiliki sama sekali.

Menurut Beoitvinik (1999) dalam (Yoserizal, 2015) kemiskinan dimaknai sebagai kehilangan kebebasan atau berarti pula adanya situasi dimana suasana keterkekangan menghimpit seseorang atau sebuah rumah tangga untuk bisa mengembangkan kehidupan yang lebih baik ada pemaknaan non-ekonomi yang perlu mendapat perhatian untuk melihat fenomena kemiskinan, artinya kemiskinan lebih merampas kedaulatan seseorang atau sebuah rumah tangga untuk dapat menikmati kehidupan yang normal.

Kemiskinan berhubungan erat juga dengan outcome yang kurang atau tidak cukup dalam hubungannya dengan a). Kesehatan, gizi dan literasi, b). Kurangnya hubungan sosial, c). Kerawanan, d). Kepercayaan diri yang rendah dan ketidak berdayaan, dalam banyak kasus, sungguh layak untuk diterapkan teknik atau metode yang telah dikembangkan dalam pengukuran kemiskinan secara moneter terhadap indikator non moneter dari sebuah kesejahteraan. Beberapa contoh dimensi kesejahteraan bisa digunakan beberapa teknik yang meliputi (Badan Pusat Statistik, 2011)

- a. Kemiskinan kesehatan dan gizi status kesehatan anggota rumah tangga dapat diambil sebagai salah satu indikator penting kesejahteraan, seseorang dapat diambil menitikberatkan pada status gizi anak sebagai ukuran out come juga pada saat insiden penyakit tertentu seperti diare, malaria, penyakit pernafasan, ataupun harapan hidup suatu kelompok penduduk tertentu.
- b. Kemiskinan pendidikan dalam bidang pendidikan, seseorang menggunakan

ukuran tingkat melek huruf sebagai salah satu karakteristik atau variabel atau mengidentifikasi penduduk miskin dan tingkat tertentu yang dipilih sebagai salah satu ambang batas yang dipakai untuk menetapkan sebuah garis kemiskinan, alternatif lain, mencakup jumlah tahun pendidikan yang dicapai terhadap jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dan seharusnya menjadi salah satu prinsip terpenting yang harus dicapai oleh seseorang ataupun kelompok.

Menurut BPS, kemiskinan adalah kondisi dimana suatu kehidupan kelompok maupun individu yang serba kekurangan sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya (Yoserizal, 2015). Ciri penting yang menjadi fokus perhatian tertuju kepada titik ketidakmampuan dan ketidakcukupan daya dukung ekonomi seseorang atau sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan yang pokok untuk keberlangsungan hidup, sebuah rumah tangga atau individu yang menghadapi kekurangan materi, kehidupan sosial dan emosional yang dicerminkan pada kurangnya pengeluaran pangan sandan dan energi dibandingkan dengan rata rata yang biasa dikeluarkan oleh umumnya, maka dari itu orang ataupun keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga miskin.

Kelaparan dan kekurangan adalah salah satu simbol yang paling potensial menunjukkan adanya kemiskinan karna pemenuhan kebutuhan yang paling penting tidak dapat terpenuhi (Seabrook, 2006). Terjadinya kelaparan dan kekurangan akan mengakibatkan keberlangsungan hidup seseorang akan terbatas dan akan membuat kehidupan akan semakin sulit.

Karbo (1996) dalam (Baidhaw, 2015) Ada empat macam teori kemiskinan yakni

1. Teori sosial Darwinin pertama kali muncul dalam sosiologi dan mencoba

menjelaskan tentang kemiskinan, kemiskinan merupakan perilaku dan sikap orang miskin itu sendiri orang miskin itu miskin karena mereka tidak bekerja keras, mereka mempergunakan uang untuk berjudi, bermabuk mabukan, dan kemewahan yang tidak dibutuhkan dan mereka juga memiliki kehidupan keluarga yang kacau balau.

2. Teori kemiskinan yang kedua budaya kemiskinan teori ini dikembangkan oleh Oscar lewis seorang antropolog iya mengembangkan teori ini dari pengalamannya di mexico kemiskinan merupakan sindrom khusus yang tumbuh dalam beberapa situasi, budaya ini menghendaki suatu setting ekonomi tunai, yakni tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran upah rendah dan warga dengan keterampilan yang rendah, ketiadaan dukungan lembaga lembaga volunter atau negara dan keluarga yang stabil, penduduk berpendapatan rendah cenderung mengembangkan budaya kemiskinan untuk menentang ideologi akumulasi yang dominan dikalangan kelas menengah. Orang miskin menyatakan bahwa mereka memiliki posisi marjinal didalam masyarakat kapitalistik yang terstrata dan individualistik, yang tidak menawarkan apapun buat mereka prospek untuk mobilitas keatas.
3. teori kemiskinan situasional teori ini berkeyakinan bahwa orang miskin berperilaku berbeda karna mereka tidak memiliki sumber daya dan kesempatan untuk meniru gaya kelas menengah. Orang orang muda memiliki sedikit kesempatan untuk pergi keperguruan tinggi dan mereka banyak putus sekolah, perempuan lebih banyak memilih keluarga matrifocal karna membolehkan mereka untuk mengklaim atas anak anak mereka. Teori ini menekankan pentingnya kondisi struktural yang menghasilkan kemiskinan namun teori ini juga cenderung fokus pada respon individu terhadap situasi objektif kemiskinan,

teorio ini secara fundamental berbeda dengan teori budaya kemiskinan, teori ini tidak berasumsi tentang adanya subkultural yang menimbulkan koherensi dan soliditas pada perilaku kaum miskin. Teori situasional menyatakan bahwa individu secara rasional mengikuti pola perilaku yang sesuai dengan situasi yang objektif dalam kehidupan mereka.

4. teori kemiskinan struktural teori ini yakin bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur tatanan sosio-ekonomi lebih luas. Yaitu struktur makro masyarakat yang melahirkan kesenjangan dan kemiskinan sebagai akibatnya, struktur kapitalisme global misalnya menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan dalam skala luas di seluruh dunia, marxisme dengan berbagai variannya mempertahankan perspektif teori ini, teori ketergantungan yang muncul diamerika latin secara khusus perhatian pada kemiskinan dunia ketiga, teori marjinalisasi dari amerika latin memiliki tradisi yang kaya mengeksplorasi nasib deprivasi dan marjinalitas manusia.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (Aidha, Ningrum, & Armintasari, 2018). Kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan uang tapi lebih dari itu tidak tercapainya standar minimal hidup layak yang mana tidak dapat dibedah secara mendalam melalui pengukuran kemiskinan moneter.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. (Putranto, nurmasari, & Susanti, 2019) Adapun penyebab kemiskinan tersebut adalah adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, kemiskinan bukan hanya menjadi masalah satu negara namun menjadi permasalahan global.

Kemiskinan memiliki berbagai sudut pandang adapun kemiskinan bisa dilihat dari berbagai cara yakni (Putranto, nurmasari, & Susanti, 2019):

1. Gambaran kekurangan materi hal ini menggambarkan situasi kelangkaan atau kekurangan barang-barang dan pelayanan dasar yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial hal ini menggambarkan ketidakmampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat termasuk didalamnya ketergantungan dan keterkucilan sosial.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai dimana makna memadai disini meliputi bidang ekonomi dan politik.

Kemiskinan merupakan sebuah siklus yang berbentuk kekurangan materi, pendidikan yang buruk, pekerjaan golongan rendah dan kekurangan materi. (Jones, Bradbury, & Boutilier, 2016). Siklus ini dipertahankan oleh banyak faktor, sebagian dianggap sebagai faktor pengendali (controlling factors), semisal ujian masuk disekolah menengah atau lokasi sekolah sekolah yang baik ditengah pemukiman masyarakat kelas menengah atau sekolah sekolah yang buruk ditengah pemukiman masyarakat kelas bawah.

ketergantungan konsumsi masyarakat Indonesia pada beras harus segera diatasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, sumber pangan alternatif, dalam hal ini pangan lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan Indonesia yang memiliki keragaman jenis pangan seperti sagu, jagung dan berbagai jenis umbi-umbian lainnya yang dapat menjadi sumber bahan makanan bagi masyarakat (Anwar & Rahman, 2020)

Dalam rencana strategis kemiskinan disebutkan bahwa dimensi kemiskinan tersebut mencakup empat hal pokok (Yoserizal, 2015), kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan dan ketidak berdayaan.

Adapun penyebab dari kemiskinan meliputi beberapa hal (Putranto, nurmasari, & Susanti, 2019) diantaranya adalah :

1. Penyebab individual dimana kemiskinan sebagai akibat dari perilaku kemampuan atau pilihan.
2. Penyebab keluarga melihat hubungan kemiskinan dengan pendidikan keluarga
3. Penyebab struktural melihat kemiskinan dari hasil struktur sosial
4. Penyebab agensi melihat kemiskinan sebagai sebagai akibat dari perbuatan pihak lain contohnya pemerintah ekonomi dan perang.
5. Penyebab subbudaya (subcultural) melihat hubungan kemiskinan dengan kehidupan sehari hari, yang dijalani atau dipelajari dalam lingkungan sekitar.

2.1.2 Investasi

2.1.2.1. Pengertian Investasi

Pada hakekatnya investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini investasi juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan saja hanya masyarakat atau kalangan suasta dalam negri. Tapi juga investor asing.

Investasi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Adapun investasi berbentuk fisik maupun nonfisik (Putranto, nurmasari, & Susanti, 2019). Dalam teori ekonomi makro lebih fokus terhadap investasi fisik yaitu investasi barang modal, bangunan, konstruksi, dan barang jadi yang masih baru.

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam kaitannya dengan pendapatan nasional hubungan antara investasi dan pendapatan nasional itu sedemikian pentingnya sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro investasi dibahas dalam bagian tersendiri.

Investasi sangat penting untuk kemajuan ekonomi karena dipakai tidak hanya untuk menggantikan alat alat produksi yang sudah aus atau sudah rusak (penyusutan), tetapi juga untuk memperbesar kapasitas produksi nasional (Investasi netto) sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta menampung lebih banyak tenaga kerja. (Gilarso , 2004).

Investasi memerlukan biaya, Sumber biaya yang diambil adalah sebagian dari penerimaan yang diambil dari rumah tangga produksi yang disisihkan khususnya dana penyusutan dan cadangan atau laba yang tidak dibagikan. Sebagian lain dari tabungan masyarakat yang biasanya disalurkan ke rumah tangga produksi melalui kredit dari perbankan melalui pasar modal (PMDN) dari anggaran pemerintah (proyek proyek pembangunan) kemungkinan juga dari luar negeri (PMA) penanaman modal asing.

Investasi berarti pembelian (atau berarti juga produksi) dari modal barang-barang yang dikonsumsi tetapi digunakan produksi produksi yang akan datang. (Kartini, 2019). Investasi merupakan pembelian barang modal baru, penambahan stok barang modal aset produktif dan produksi barang modal yang bersifat lama.

Investasi merupakan penambahan barang modal secara yang positif, investasi sendiri dibedakan menjadi dua investasi riil dan investasi finansial, yang dimaksud investasi riil merupakan investasi terhadap barang-barang tahan lama yakni barang-barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi, sedangkan investasi finansial merupakan investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi dan surat bukti hutang lainnya. (Hellen & Mintart, 2017)

2.1.2.2. Teori konvensional klasik

Teori konvensional klasik tentang investasi pada pokoknya didasarkan pada teori produktivitas batas (marginal productive) dari faktor produksi modal (capital). Berdasarkan teori ini besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginal dibandingkan dengan tingkat bunga, sehingga investasi itu akan terus dilakukan bila mana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari tingkat bunga yang akan diterima. (Priyono & Chandra, 2016).

Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekayaan itu memberikan hasil yang berbeda-beda dan juga mengandung resiko yang tidak sama, maka haruslah dipilih cara, mana yang lebih baik, yang menguntungkan dan memberi kepuasan secara maksimal bagi seseorang yang memiliki kekayaan. Pemilik kekayaan harus memilih dan menentukan putusan tentang manakah yang lebih menguntungkan antara membeli saham obligasi jangka panjang, dan saham obligasi jangka pendek atau diinvestasikan dalam perusahaan.

Berdasarkan teori produktivitas batas maka, soal investasi dipecah menjadi prinsip-prinsip maksimisasi laba dari perusahaan-perusahaan individual, sebab suatu perusahaan akan memaksimalkan labanya dalam situasi persaingan sempurna,

bila mana perusahaan tersebut menggunakan modalnya sampai dalam jumlah produk marginal dari modal itu sama dengan harga modal, yaitu suku bunga.

Adapun secara garis besar dari teori klasik tentang investasi adalah (Priyono & Chandra, 2016) sebagai berikut :

- a. Investasi akan dijalankan bilamana pendapatan dari investasi itu (prospected yield) lebih besar dari tingkat bunga bila hendak membandingkan antara pendapatan dari investasi dengan suku bunga maka tidak boleh dilupakan bahwa barang-barang modal pada umumnya mempunyai penggunaan yang panjang dan tidak hanya sekali pakai sehingga pendapatan dari investasi (yang akan dibandingkan dengan bunga) adalah terdiri dari jumlah-jumlah pendapatan yang akan diterima setiap tahun selama penggunaan barang modal itu dalam produksi (umur ekonomis) jumlah pendapatan-pendapatan tiap tahun selanjutnya dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku sekarang.
- b. Investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan bila mana biaya (ongkos) plus bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan dari hasil investasi itu. Dengan demikian unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penentuan investasi adalah: 1. Tingkat ongkos (biaya) atas modal, 2. Tingkat bunga. 3. Tingginya hasil pendapatan yang diterima. Berubahnya dari ketiga faktor di atas, akan mengakibatkan berubahnya perhitungan profitabilitas.

2.1.2.3. Teori Keynes

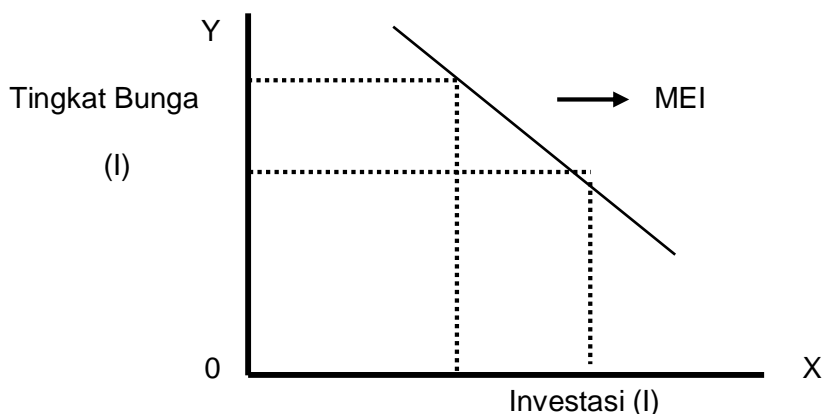
Menurut pandangan dari J.M Keynes masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan pada konsep Marginal Efficiency of Investment (MEI). Dengan mendasarkan atas konsep pemikiran tersebut investasi akan dilaksanakan apabila MEI masih lebih tinggi dari

pada tingkat bunga.

Secara grafis MEI digambarkan sebagai suatu skedul yang menurun, skedul ini menggambarkan jumlah investasi yang akan terlaksana pada setiap tingkat bunga. Menurutnya tingkat skedul MEI ini antara lain disebabkan oleh dua (Priyono & Chandra, 2016) yaitu :

1. Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat, semakin rendahnya MEI itu.
2. Semakin banyak investasi dilakukan, maka ongkos dan barang modal (aset) menjadi lebih tinggi.

Pada bagan berikut menunjukkan skedul MEI Gambar 1.7 berikut



Gambar 1.7 Marginal Efficiency of Investment (MEI)

Menurut teori Keynes tentang investasi, pertimbangan pokok untuk terlaksananya investasi adalah faktor efisiensi marginal dari investasi itu sendiri. Efisiensi marginal dari investasi ini sangat tergantung pada perkiraan-perkiraan dan perhitungan pengusaha terhadap perkembangan situasi ekonomi masa depan. Oleh sebab itu tingkat MEI tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Pandangan ke masa depan bagi seorang pengusaha dengan kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor-faktor ekonomi maupun faktor faktor psikologis, menghubungkan antara pengusaha dengan kemungkinan untuk mengadakan investasi, perlulah diketahui tentang apaya yang disebut entrepreneur. Entrepreneur, merupakan sejenis pengusaha yang memiliki kelakuan dan bakat-bakat khusus yang tidak didapati pada pengusaha-pengusaha lainnya. Golongan entrepreneur ini mempunyai peranan yang sangat penting artinya dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia barat (Priyono & Chandra, 2016). Entrepreneur adalah seorang inovator yaitu orang yang mengusahakan kombinasi-kombinasi dari dalam proses produksi guna menciptakan kemajuan-kemajuan baru dan kenaikan hasil produksi. Para entrepreneur inilah yang mampu mempergunakan kesempatan investasi yang potensial sehingga kemungkinan keberhasilan sangat besar.

2.1.2.4. Investasi menurut teori ekonomi makro

Investasi menurut konteks ekonomi makro atsu sesuai dengan perhitungan pendapatan nasional adalah (Putranto, nurmasari, & Susanti, 2019) sebagai berikut :

1. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan.

Investasi barang modal dan bangunan sering disebut sebagai investasi dalam bentuk hartab tetap. Hal ini karena daya tahan atau umur dari barang modal dan bangunan umumnya lebih dari satu tahun. Yang termasuk investasi barang modal dan bangunan antara lain mesin-mesin, pengeluaran untuk pembelian pabrik-pabrik, bangunan dan gedung baru serta peralatan produksi.

2. Investasi persediaan

Investasi persediaan dapat dilakukan dalam bentuk persediaan bahan dan barang. Investasi persediaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

atau keuntungan dimasa mendatang

2.1.2.5. Faktor Faktor yang mempengaruhi investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi antara lain sebagai berikut (Putranto, nurmasari, & Susanti, 2019)

1. Keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan

Suatu investasi pasti mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tingkat pengembalian atau keuntungan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana keadaan didalam perusahaan (internal) dan diluar perusahaan (eksternal) tersebut.

- a. Kondisi internal perusahaan sangat mempengaruhi tingkat pengembalian yang diharapkan suatu investasi. Kondisi internal perusahaan ini meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM) teknologi yang digunakan dan tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut
- b. Kondisi luar perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengembalian atau keuntungan, antara lain kebijakan lain yang ditempuh pemerintah faktor sosial politik dan faktor keamanan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional.

2. Biaya investasi

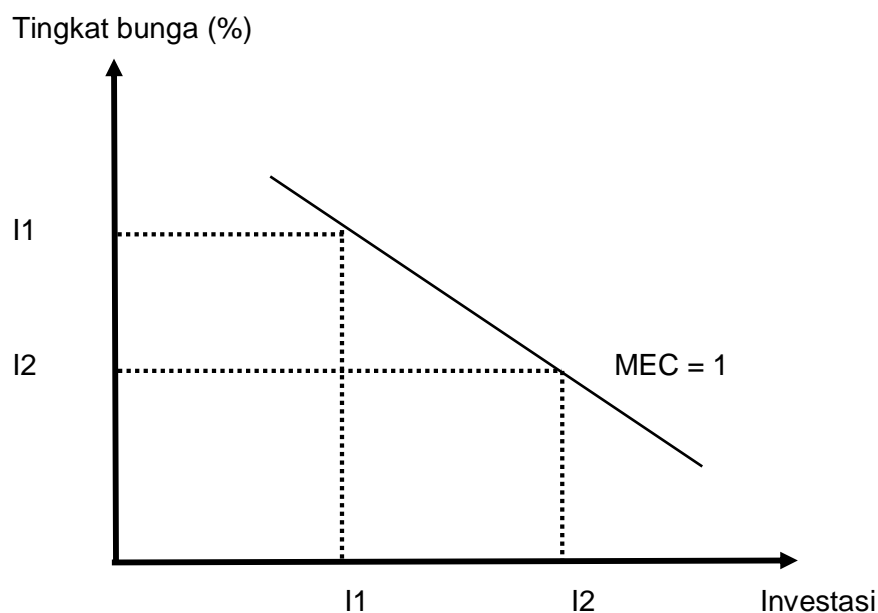
Ketika akan melakukan investasi, individu atau perusahaan akan mengeluarkan biaya, biaya yang dikeluarkan pada awal kegiatan investasi dan biasanya dalam jumlah yang besar disebut dengan biaya investasi. Dalam suatu investasi, selain biaya investasi ada juga biaya operasional yang dikeluarkan rutin setiap tahun selama umur investasi.

3. *Marginal Efficiency of Capital (MEC)* dan tingkat bunga

Marginal Efficiency of Capital (MEC) menyatakan besarnya keuntungan yang

akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Sedangkan suku bunga adalah imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang (biasanya dalam bentuk persen). *Marginal Efficiency of Capital (MEC)* dan tingkat bunga merupakan hal yang saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi.

Hubungan antara *Marginal Efficiency of capital (MEC)* dan tingkat bunga dapat dilihat pada gambar. Bentuk slope negatif ini menunjukkan bahwa jika tingkat bunga nilainya turun, maka besarnya investasi akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat bunga mengalami kenaikan, maka investasi akan menurun pada gambar 1.8



Hubungan tingkat bunga dan investasi gambar 1.8

Hubungan antara Marginal Efficiency of Capital (MEC) dan tingkat bunga dapat digunakan oleh investor untuk membantu dalam mengambil keputusan :

- a. Jika tingkat bunga lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan (MEC) maka investasi dilaksanakan.

- b. Jika tingkat bunga lebih besar maka dari keuntungan yang diharapkan (MEC) maka investasi dilaksanakan.
- c. Jika tingkat bunga sama maka keuntungan yang diharapkan (MEC) maka investasi bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak.

4. *Marginal Efficiency Of Capital dan Marginal Efficiency of Investment*

Marginal Efficiency Of Capital (MEC) adalah suatu kurva yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal, sedangkan *Marginal Efficiency of Investment (MEI)* adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan diantara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang diinvestasikan. MEC dan MEI akan sama pada tingkat bunga tertentu.

2.1.5. Tenaga Kerja

2.1.5.1. Pengertian Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. (Aryanti & Setiadi, 2019).

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan

di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda. Misalnya di India tenaga kerja menggunakan batas umur 14 sampai 60 tahun, sedangkan orang yang berumur di bawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Amerika Serikat tenaga kerja menggunakan batasan umur 16 tahun atau lebih, sedangkan mereka yang berumur di bawah 16 tahun tergolong bukan tenaga kerja. Di Negara Indonesia telah menetapkan batas usia tenaga kerja menjadi 15 tahun yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. (Badan pusat statistik, 2021)

Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk, namun tidak semua penduduk menawarkan tenaga kerjanya dipasar tenaga kerja, pertimbangan utamanya adalah faktor umum yang dianggap pantas sebagai tenaga kerja yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan produksi (Arifin, 2002)

(BPS, 2020) mengklasifikasikan kelompok angkatan kerja digolongkan bekerja sebagai berikut:

1. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu.
2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam tetapi mereka adalah:
 - a. Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk karena sakit, cuti, mangkir, mogok, perusahaan menghentikan

kegiatannya sementara (misalnya: kerusakan mesin dan sebagainya).

b. Petani-petani yang megusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen dan menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya;

c. Orang-orang yang bekerja dalam bidang keahlian seperti: dokter, dosen dan lain-lain.

Definisi angkatan kerja (*labor force*) adalah mereka yang selama seminggu yang lalu sebelum waktu pencacahan mempunyai pekerjaan; atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, cuti dan sebagainya; atau tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan alias termasuk definisi pengangguran terbuka di atas (Arifin, 2002). Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk yang usia kerja yang potensial untuk mereka bekerja. Potensial yang dimaksudkan adalah kesiapan setiap orang untuk masuk kepasar kerja baik saat mereka bekerja yang diaman disini mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang masih tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi/produksi.

Angkatan kerja merupakan penduduk, baik perempuan maupun laki laki dalam usia produktif (usia kerja) yang berumur 15-64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan (menganggur). (Aryanti & Setiadi, 2019).

Kesempatan kerja merupakan yang mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong/kosong. (Arifin, 2002)

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja (AK) secara tradisional sebenarnya dianggap sebagai sebagai salah satu faktor positif yang memacu

pertumbuhan ekonomi, karna dengan adanya jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya itu lebih besar, maka dari itu penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi, meningkatnya permintaan atas tenaga kerja yang berasal dari sektor tradisional bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern, maka dari itu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. (Hellen & Mintart, 2017)

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2011).

Angkatan kerja terbagi menjadi dua bagian, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran (Aryanti & Setiadi, 2019).

- a. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi
- b. Penganggur yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya adalah orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran disebabkan antara lain pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, penerapan sistem padat modal dalam proses produksi, keterbatasan lapangan kerja karena lesunya perekonomian serta persebaran tenaga kerja yang tidak merata.

2.1.6. Pengeluaran Pemerintah

2.1.6.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah mutlak ikut berperan dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, bukan hanya, menyediakan barang-barang publik melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang-barang konsumsi disamping memperbaiki distribusi pendapatan, pemeliharaan stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah memerlukan banyak sumber pendapatan dalam rangka melaksanakan perannya untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) untuk pembelian barang dan jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diterima dari pajak (fiscal policy). (Jaelani, 2018). Jadi pengeluaran pemerintah biasanya ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditunjukkan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah pada dasarnya menyangkut tentang pelayanan publik yang harus disediakan secara efisien, efektif, adil dan transparan, penyediaan layanan ini dapat berlangsung dalam dua bentuk yakni *direct service provision* maupun *indirect service management*. (Muluk, 2009).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu, namun demikian proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu

bentuk prekonomian. (Jaelani, 2018)

Keynes berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya pelambatan ekonomi pemerintah perlu melakukan pengeluaran belanja dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, langkah ini diperlukan untuk mengimbangi peningkatan kecenderungan konsumsi masyarakat dalam perekonomian. (Sumardjoko , 2017)

Kekayaan negara yang diurus langsung oleh pemerintah dituangkan dalam anggaran publik, jadi anggaran publik merupakan alat pelaksana manajemen keuangan publik, dimana melalui anggaran publik, kekayaan negara dapat bertambah atau berkurang, kekayaan negara dapat bertambah jika membangun proyek-proyek yang dibiayai selesai dilaksanakan, sedangkan pengeluaran negara yang membiayai fungsi reguler pemerintah akan mengurangi uang-uang negara, dengan demikian secara otomatis mengurangi kekayaan negara. (Domai, 2010).

Maka dari itu penerimaan negara yang bersifat penerimaan dalam negeri (pajak dan non pajak hibah) dan penerimaan pinjaman (kredit luar negeri dan hutang/pinjaman yang berasal dari dalam negeri) bersifat menambah uang-uang negara dan dapat dianggap sebagai penambah kekayaan negara dan dapat juga pengurangan uang uang negara yang berada didalam kas negara tetapi bersifat menambah kekayaan negara misalnya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan-perusahaan.

Menurut Sadano soekirno dalam (Senewe, 2021) pengeluaran pemerintah merupakan pembiayaan administrasi pemerintah dan angkatan lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat membiayai pembelanjaan angkatan bersenjata

dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting dalam pembangunan.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, pesentase investasi pemerintah terhadap total investasinya adalah besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana-prasarana yakni pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Hellen & Mintart, 2017)

Adanya gangguan sosial mengakibatkan terjadinya konsentrasi kegiatan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta concentration effect dan inspection effect yang timbul karena masyarakat sadar akan hal hal yang ditangani oleh pemerintah setelah selsai gangguan tersebut

2.1.6.2. Teori para ahli

Teori makro tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dianalisis dengan model pembangunan rostow dan musgrave, hukum wagner tentang perkembangan aktivitas pemerintah, dan teori peacock dan wiseman, teori teori tersebut dilatar belakangi adanya perkembangan pengeluaran pemerintah yang selalau. (Jaelani, 2018)

a. Model pembangunan Rostow dan Musgrave

Analisis rostow dan musgrave tentang perkembangan peranan pemerintah direalisasikan dengan tahapan pertumbuhan ekonomi yang meliputi tahapan awal, menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal ini perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningklatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Menurut musgrave suatu proses pembangunan akan ditandai dengan

adanya investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Adapun menurut Rostow pada tingkat ekonomi lanjut pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, hari tua, program layanan kesehatan masyarakat.

b. Hukum Wagner

Perkembangan pengeluaran bagi kegiatan pemerintah semakin meningkat. Wagner menyebut kondisi ini sebagai "Hukum selalu makin meningkatnya kegiatan negara (law of ever increasing state activities) atau "hukum makin meningkatnya kebutuhan negara" peningkatan ini terletak pada kegiatan dan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah, termasuk pengeluaran pemerintah.

Musgrave menyebut hukum Wagner ini dengan hukum growing public expenditures atau hukum makin meningkatnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah konsekuensinya hukum Wagner ini menunjukkan bahwa makin meningkatnya kegiatan pemerintah, makin meningkatnya kebutuhan pemerintah, dan makin meningkatnya pengeluaran negara. Hukum Wagner ini memberikan asumsi bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada penelitian empiris dengan penekanan pola waktu dan perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat

continuous growth, melainkan seperti tangga rumah, keduanya menamakan dengan istilah “steplike” peacock dan wiseman menilai bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori ini pula menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

2.1.6.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Anggaran pendapatan dan belanja dapat dibedakan menjadi dua yaitu Anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh pemerintah pusat dan anggaran pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah. (Domai, 2010)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

a. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap

tahun ditetapkan dengan undang undang

- b. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN
- c. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya

Dalam hal surplus penerimaan negara sebagaimana dimaksud diatas yang akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara, pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR

2. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Propinsi/Kab/Kota. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

- a. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah
- b. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan kedalam APBD
- c. Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya

- d. Dalam hal surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud diatas akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan daerah, pelaksanaanya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Antara Investasi Dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

menurut Kuznet (Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) juga mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik.

Pendapatan perkapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Lincoln Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2000). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera

penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Hubungan antara Investasi dengan Kemiskinan Pada suatu negara atau daerah selalu salah satu orientasi kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan investasi manusia maupun investasi dalam sektor riil. Harrod Domar menjelaskan investasi sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi, karena : (1) investasi dapat menciptakan tambahan pendapatan; dan (2) investasi dapat pula memperbesar kapasitas produksi melalui meningkatnya persediaan modal, yang disebut efek penawaran. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2006). Jadi ketika investasi meningkat di suatu daerah akan mengakibatkan meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

2.2.2. Hubungan Antara Tenaga Kerja Dan Kemiskinan

Hubungan antara Tenaga Kerja dengan Kemiskinan Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Soebagiyo, 2013). Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi

pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat

(Sukirno, 2004). 2. Hubungan antara Investasi dengan Kemiskinan Pada suatu negara atau daerah selalu menjadi salah satu orientasi kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan investasi manusia maupun investasi dalam sektor riil. Harrod Domar menjelaskan investasi sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi, karena : (1) investasi dapat menciptakan tambahan pendapatan; dan (2) investasi dapat pula memperbesar kapasitas produksi melalui meningkatnya persediaan modal, yang disebut efek penawaran. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2006).

Jadi ketika investasi meningkat di suatu daerah akan mengakibatkan meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

2.2.3. Hubungan Antara Penegeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah diartikan sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah pada sektor fiskal yang ditujukan guna mendorong peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja, mempertahankan stabilitas ekonomi serta mencapai pemerataan pendapatan (Amalia et al., 2015).

Sukirno (2006) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah suatu aktivitas pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengatur jalannya kegiatan perekonomian dengan cara menentukan jumlah

pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah yang termaktub dalam APBN dan APBD yang merupakan salah satu bagian penting dalam kebijakan fiskal. Teori makro ekonomi mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga kategori esensial yaitu sebagai berikut : 1) pengeluaran yang difungsikan untuk belanja jasa dan barang; 2) pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai; dan 3) pembayaran transfer pemerintah (Boediono, 1999). Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh penting dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mehmood & Sadiq (2010) menjumpai hasil bahwa antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan memiliki hubungan pada jangka pendek begitu pula pada jangka panjang. Hal tersebut diperkuat melalui studi yang dihasilkan oleh Amalia et al. (2015) yang mengkonfirmasi bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak secara langsung terhadap kemiskinan. Jha (2001), Ramadhan & Mariyanti (2013), Wibowo (2014), Kolawole et al. (2015), Mufliha (2018), Kristinawati et al. (2018) dalam hasil penelitiannya mengidentifikasi bahwa jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran subsidi. Jha (2001) menunjukkan dalam hasil studinya bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan.

Hal tersebut ekuivalen dengan yang disampaikan oleh Kolawole et al. (2015) dalam penelitiannya menjumpai bahwa kenaikan jumlah dalam pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dapat membantu upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan Mufliha (2018) dan Kristinawati et al. (2018) mendapati bahwa pengeluaran subsidi akan mengurangi

tingkat kemiskinan.

2.3. Tinjauan Empiris

Adapun rencana dari penelitian ini dan turut didukung oleh beberapa temuan empiris dari peneliti-peneliti sebelumnya, hasil penelitian

(Wahana, 2020) menemukan bahwa Investasi penanaman modal asing (PMA) Dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2019. Nengah Rai Narka Suda Pratama, Made Suyana Utama (2019) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung dan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, investasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Santi Nurmainah (2013) melakukan penelitian dimana penelitian ini berjudul Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui Structural Equation Modeling dengan AMOS 20 Program dinyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Meiran Panggabean dan Eka Ria Lestari Matondang (2019) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan

manusia, (IPM). Dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017 melalui regresi data panel menggunakan Eviews 10 disimpulkan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

(Mira & Kindangen, 2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi sulawesi utara dengan analisis jalur ditemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dan TPAK laki laki dan perempuan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

(Filakati, 2022) Melakukan penelitian dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dan Pro-Kemiskinan di Zambia 2006-2015: Sejauh Mana? Dengan analisis trickle-down ditemukan bahwa menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Zambia belum berpengaruh secara signifikan pada orang miskin berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan setara kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi positif tercatat selama periode ini dan tingkat kemiskinan menurun secara perlahan, kaum miskin di Zambia secara proporsional memperoleh lebih sedikit manfaat dari pertumbuhan tersebut dibandingkan dengan mereka yang tidak miskin.

(Christ Mariel, 2022) Dengan penelitian yang berjudul Apakah Pendidikan Perempuan dan Partisipasi Angkatan Kerja Berkontribusi pada Pertumbuhan

Ekonomi di Afghanistan? Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan desain deskriptif karena datanya bersifat numerik. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak Stata. Analisis regresi menunjukkan bahwa hubungan antara Pendidikan Menengah Atas dengan Produk Domestik Bruto adalah positif dan signifikan. Hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Produk Domestik Bruto adalah negatif dan signifikan. Namun, korelasi antara Perempuan Bisnis dan Indeks Hukum dan Produk Domestik Bruto adalah positif dan tidak signifikan. Hubungan antara Tingkat Pengangguran dengan Produk Domestik Bruto adalah negatif dan tidak signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya masih kecil.

(Liu & Li, 2019) Dengan penelitian yang berjudul FDI, Ketenagakerjaan, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Beijing: Mekanisme dan Uji Empiris dengan menggunakan model data panel Temuan ini menunjukkan bahwa untuk enam kabupaten dalam kota dengan struktur ekonomi dan infrastruktur kota yang berkembang baik, FDI dan Ketenagakerjaan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; sedangkan untuk sepuluh kabupaten terluar kota, pertumbuhan ekonomi tampaknya masih didorong oleh penyerapan tenaga kerja dan investasi modal tetap.

(Long & Mensah, 2021) Dengan penelitian yang berjudul Dampak FDI pada Pertumbuhan Ekonomi, Lapangan Kerja, dan Pengurangan Kemiskinan di Ghana Dampak FDI pada Pertumbuhan Ekonomi, Lapangan Kerja, dan Pengurangan Kemiskinan di Ghana dan menemukan menunjukkan bahwa investasi asing langsung dapat mendorong pembangunan ekonomi Ghana, dan investasi asing langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja di Ghana dan sekaligus

mengurangi kemiskinan. Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan yang menguntungkan harus diadopsi untuk mendorong dan mendukung Ghana, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.3.1. Penelitian yang telah ada sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hellen samarinda tahun 2017 pengaruh Investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. Hasil dari temuan ini tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sementara investasi dan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian dilakukan oleh Taufiq Istianto Manado tahun 2021 Pengaruh belanja daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Hasil dari temuan ini Belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Julita Senewe Manado tahun 2021 Pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Hasil dari temuan ini Secara parsial Tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan secara simultan tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pemaangunan manusia.

Anak Agung Istri Diah Paramita Bali tahun 2015 pengaruh Investasi dan

pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan Hasil dari temuan ini Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan untuk pengaruh investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dan untuk pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.

Dicky Fernando padang Tahun 2021 Hubungan kaulitas antar ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskian Hasil dari temuan ini Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, terdapat hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, dan terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

Mustika Puspa Rani Indonesia tahun 2021 Investasi modal fisik dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Hasil dari temuan ini Modal aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ahmad jazuli rahman Malang Tahun 2016 pengaruh Investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Hasil dari temuan ini Secara serentak Investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto regional bruto (PDRB) sedangkan uji parsial investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap produk domestik bruto regional bruto.

Andhita Asriani Jawa Timur 2021 pengaruh Kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap IPM Hasil temuan penelitian ini menunjukkan Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Heppi syofya Jambi tahun 2018 pengaruh Pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten dan pengangguran, terhadap kemiskinan Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan memiliki pengaruh yang berniali negatif dan signifikan sedangkan pengangguran terhadap kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan.

Amgi Filiasari Banten 2021 Analisis pengaruh Angkatan kerja, upah, PDRB dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Angkatan kerja, upah, pdrb dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

(Kimoro, Keong, & Sea, 2017) / Afrika Analisis Pengeluaran pemerintah dan efisiensi, terhadap Pertumbuhan Ekonomi hasil temuan ini menunjukkan peningkatan pengeluaran pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berpenghasilan rendah di Sub Sahara Afrika. Dan ketika pengeluaran

pemerintah berinteraksi dengan efisiensi pemerintah, tidak ditemukan hubungan efisiensi pemerintah untuk meningkatkan dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Haydaroğlu, 2016) / Turkey Investasi asing langsung, kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan Ekonomi Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indeks economic freedom EF berhubungan positif dan Signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya hasil tersebut menunjukkan bahwa FDI berhubungan positif dan signifikan secara statistik determinan terhadap pertumbuhan ekonomi. dan menemukan bahwa EF dan FDI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Rodionova, Yakubovskiy, & Kyfak, 2019) / Ukraine Modal asing/ Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dari penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

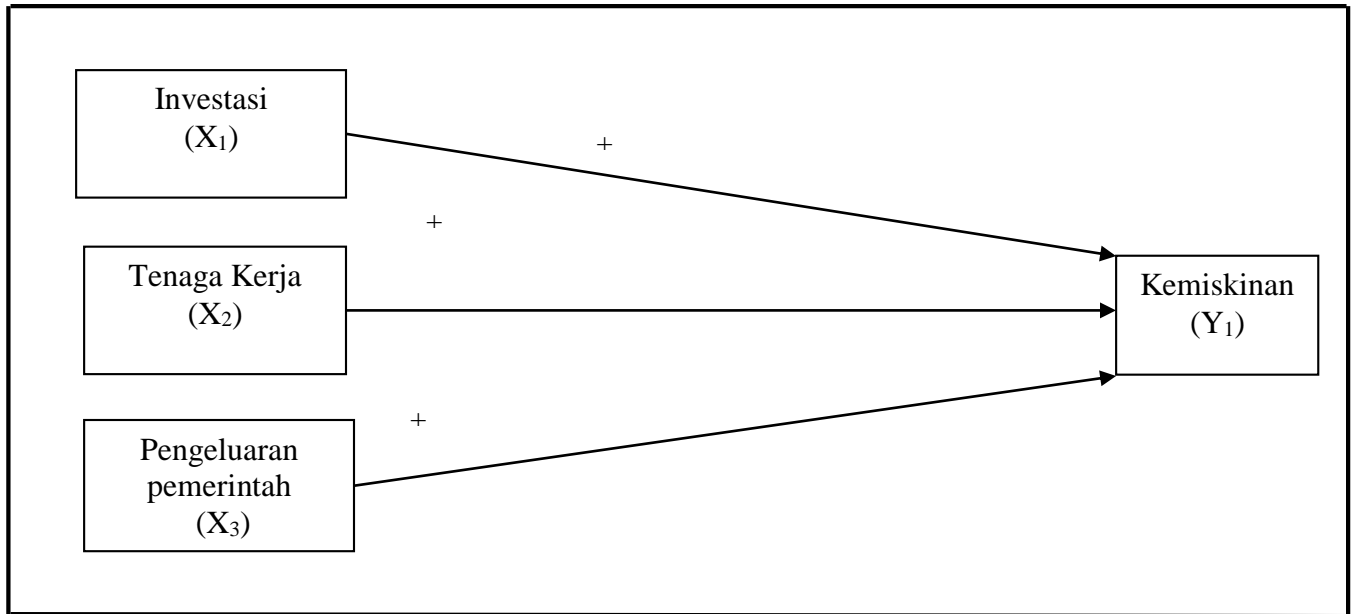
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya dan Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengupayakan agar pendapatan masyarakat meningkat dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi negara maju maupun Negara berkembang, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya. Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, (1) karena kualitas penduduk yang rendah, (2) karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan (3) karena adanya perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2004).

Kerangka konseptual merupakan skema/kerangka sederhana untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan agar dapat diketahui secara jelas dan terarah. Adapun secara skematis, kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :



3.1 Gambar Kerangka Konseptual

3.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Investasi berpengaruh langsung terhadap kemiskinan .
2. Diduga Tenaga Kerja berpengaruh langsung terhadap kemiskinan.
3. Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh langsung terhadap kemiskinan.